

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian Yudhistira (2003) tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 1991-2005”, peneliti menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan tingkat pendapatan, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks gini sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah data panel. Berdasarkan hasil dan analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

Peneliti juga menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran dan indeks gini secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat pengangguran dan indeks gini dapat menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia dan pada tingkat pendapatan bila semakin meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan tingkat

inflasi secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh akan tetapi pengaruh tersebut tidak secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia..

Dalam penelitian Wijayanto (2010) tentang “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008”, peneliti menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan PDRB, pendidikan, dan pengangguran sebagai variabel independen. . Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah data panel. Berdasarkan hasil dan analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Dalam penelitian Widiastuti (2010) tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”, peneliti menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan, dan desentralisasi fiskal sebagai variabel independen. . Data yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah data panel dengan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil dan analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Dalam penelitian Wiguna (2013) tentang “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010”, peneliti menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan PDRB, pendidikan, dan pengangguran sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan panel data melalui pendekatan efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Dalam penelitian Permana (2012) tentang “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”, peneliti menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan PDRB, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Dalam penelitian Prastyo (2010) tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2003-2007”, peneliti menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian yang digunakan adalah data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Dalam penelitian Putri (2014) tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012”, peneliti menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan belanja publik sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari terbitan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan model *common effect*. Berdasarkan hasil dan analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per kapita terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Sedangkan belanja publik berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang muncul ketika seseorang dan sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan finansial dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga dalam banyak hal seperti lain, seperti : tingkat kesehatan, pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro, (2000) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang

berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (2000) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005), proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus , bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan

nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

- h. *Exploatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- i. *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.2.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut :

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas nya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga akan rendah, upahnya juga ikut rendah.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang ada pada gambar. Adanya

ketebelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber : Nurske (1953) dalam Kuncoro, 2000

Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) yang mengemukakan bahwa Negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa

lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*).

Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di Negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu. Dari segi penawaran modal dan permintaan modal.

Dari segi penawaran modal ingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat redah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu Negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di Negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

2.2.3.1 Pengangguran

Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama

karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Pengangguran sendiri mempunyai beberapa bentuk, diantaranya:

1. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

2. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Kemerossotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran fiskal.

3. Pengangguran Teknologi

Mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, adakalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengangguran mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

2.2.3.2 Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi suatu pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Dalam tujuan pembangunan erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah indeks gini dan kriteria bank dunia (Badan Pusat Statistik, 2011). Kriteria bank dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk pendapatan terendah.

Kesenjangan distribusi dapat dikategorikan antara lain :

1. Tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan.
2. Sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12%-17% bagian pendapatan.

3. Rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Indeks Gini (*Ratio Gini*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam rentang waktu satu tahun.

$$\text{Rumus Gini Ratio : GR} = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan :

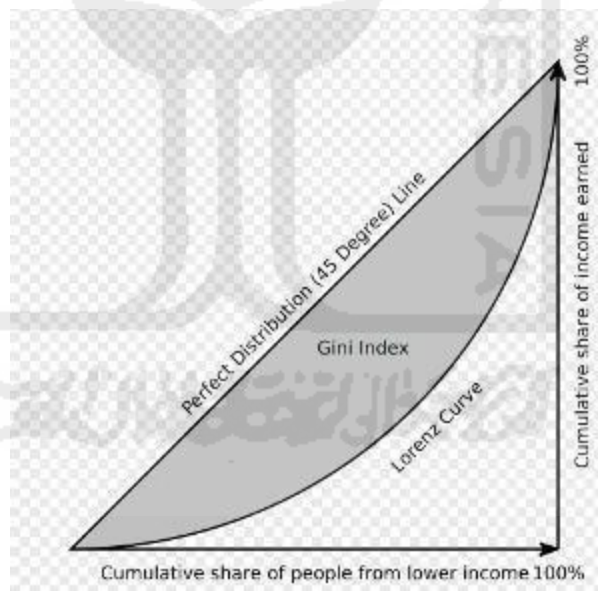
F_i = Jumlah persen(%) penerima pendapatan kelas ke i

Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

1. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan Satu.
2. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
3. Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
4. Nilai $GR = 0$ atau $GR = 1$ tidak pernah diperoleh di lapangan. *Gini ratio* biasanya disertai dengan kurva yang di sebut kurva Lorenz.

Indeks gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien gini, grafik persentase kumulatif penduduk dari termiskin hingga terkaya digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertical ini menghasilkan kurva Lorenz

Gambar 2.2
Kurva Lorenz.



Sumber: Wikipedia

Dari gambar di atas menunjukkan sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertical menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk tersebut.

Sedangkan garis diagonal di tengah disebut “garis pemerataan sempurna”. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin rendah.

2.2.3.3 Jumlah Penduduk

Menurut Sukirno (1997), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran. Negara sedang berkembang kebanyakan mengalami dengan laju pertumbuhan penduduk yang

tinggi, fakta menunjukkan tiga per empat penduduk dunia tinggal di Negara-negara sedang berkembang. Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya disebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan kurangnya pengetahuan akan KB. Sementara itu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki penduduk Negara sedang berkembang.

Konsep yang populer mengenai ekonomi demografi yaitu konsep transisi demografi. Pada dasarnya konsep ini mencoba menerangkan mengapa hampir semua Negara yang kini tergolong sebagai Negara maju sama-sama telah melewati sejarah populasi modern yang terdiri dari tiga tahapan besar. Tahap pertama, yaitu masa sebelum modernisasi dimana Negara-negara tersebut memiliki laju pertumbuhan penduduk yang stabil atau sangat lambat. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran dan angka kematian. Tahap kedua, berlangsung setelah adanya modernisasi yang kemudian menghasilkan berbagai metode penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik, makanan yang lebih bergizi, pendapatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas hidup lainnya, sehingga secara bertahap-lahan usia harapan hidup menjadi lebih lama. Akan tetapi penurunan angka kematian tersebut tidak segera diimbangi oleh turunnya angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tajam. Tahapan kedua ini menjadi

awal dari proses transisi demografi, yaitu dari keadaan stabil atau laju pertumbuhan penduduk yang lambat ke laju pertumbuhan yang terus meningkat dengan cepat, sebelum pada akhirnya kembali ke laju pertumbuhan yang menurun. Terakhir, tahapan ketiga segera berlangsung dengan munculnya berbagai macam dorongan dan pengaruh upaya-upaya modernisasi pembangunan yang menyebabkan turunnya tingkat kelahiran. Pada akhirnya tingkat kelahiran berhasil turun tajam sampai sama rendahnya dengan angka kematian, sehingga secara netto laju pertumbuhan penduduk menjadi sangat rendah atau bahkan nol.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik 2007-2008)

Adapun komponen Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negaranegara Asia Tenggara umumnya.

Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun .

2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung

setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0. Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C(i) && \text{Jika } C(i) < Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C(i) < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C(i) - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C(i) < 3Z
 \end{aligned}$$

Dan seterusnya. Dimana :

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara atriiber sebesar Rp 549.500,- per kapita per tahun atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

2.2.4 Hubungan Antar Variabel Independent dengan Variabel Dependent

2.2.5.1 Hubungan Antara Pengangguran dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang.

Menurut Arsyad (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang

yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin

2.2.5.2 Hubungan Antara Indeks Gini dengan Kemiskinan

Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari sepuluh bujur sangkar dimana kurva lorenz tersebut berada (Arsyad, 2010).

Menurut Todaro (2005) pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka

berada digaris kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidakmerataan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan

2.2.5.3 Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno (1997), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Fakta menunjukkan, di kebanyakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan Negara dengan jumlah penduduk sedikit. Banyak teori dan pendapat para ahli yang meyakini adanya hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan. Salah satunya adalah Thomas Robert Malthus. Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan

habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia.

2.2.5.4 Hubungan Antara IPM dengan Kemiskinan

Dalam penelitian Napitupulu (2007), disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Todaro (2005) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.6 Hipotesis

1. Diduga Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2013
2. Diduga Indeks Gini berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2013
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2013
4. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2013
5. Diduga Pengangguran, Indeks Gini, Jumlah Penduduk, dan IPM secara bersama-sama dapat mempengaruhi terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2013